

**THE EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNANCE AFTER LOCAL ELECTION CONFLICT IN TOLIKARA REGENCY PAPUA PROVINCE IN 2017**

**Anjely Mira Kogoya**

*Abstrak*

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua belum efektif. Hal ini disebabkan pencapaian nilai produktivitas pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara, nampaknya belum optimal. Nilai fleksibilitas organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara tercermin hanya terbatas pada aspek penyusunan struktur dan format organisasi perangkat daerahnya. Masyarakat belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tolikara.

Kata Kunci: efektivitas, pemerintahan dan pemilihan

**PENDAHULUAN**

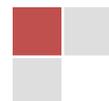
Kontestasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal yang didominasi oleh kasus kasus konflik selama pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan suatu fenomena yang antitesis dari cara-cara demokrasi dalam memilih seorang pemimpin Demokrasi sesungguhnya menghendaki cara-cara nonkekerasan dalam menentukan seorang pemimpin karena prinsip demokrasi dalam suatu pemilihan apakah itu pemilu maupun pilkada adalah sejauh mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama prosesnya menggunakan cara-cara yang demokratis dan menghindari cara-cara pemaksaan bahkan kekerasan.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Calon Kepala Daerah dan Hasil Pengumuman Menurut**  
**KPU Tolikara Tahun 2017**

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara (orang)
1.	Usman G. Wanimbo – Dinus Wanimbo	118.640
2.	Amos Yikwa – Robeka Enembe	18.543
3.	Jhon Tabo – Barnabas Weya	79.020

Sumber : KPU Tolikara, 2017

Konflik dua kelompok pendukung calon bupati di Pemilukada Kabupaten Tolikara pada tanggal 24 Februari Tahun 2017, menewaskan 11 orang hingga saat ini dan 201 orang luka berat maupun ringan. Tidak hanya itu, kerusuhan ini berimbas pada 121 rumah dan



beberapa fasilitas perkantoran yang dibakar massa. Hal ini terjadi karena kubu John Tabo, SE., MBA-Barnabas Weya, S. Pd, tidak menerima hasil pemilukada.

Meskipun pasangan Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo sudah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tolikara sebagai pemenang Pilkada 2017 dengan perolehan suara 118.640 suara (54,87%) melalui SK Nomor :09/KPTS/KPU/Kab.Tolikara/II/2017, namun berdasarkan hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi, Hakim menyatakan SK KPUD Tolikara tersebut cacat hukum, sehingga harus dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Dimana dalam proses menuju pelaksanaan PSU tersebut dinamika politik di Kabupaten Tolikara cukup dinamis dan penuh dengan intrik-intrik politik, salah satunya yang mengemuka adalah soal keterlibatan Gubernur yang di duga memberikan dukungan kepada pasangan calon Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo pada sambutannya dalam sebuah acara di Kabupaten Tolikara.

Hasil PSU pasangan calon Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo berdasarkan hasil pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua yang mengambil alih tahapan PSU karena seluruh komisioner KPUD Kabupaten Tolikara di non aktifkan, pasangan calon Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo kembali mengungguli dua pasangan calon lainnya, dengan perolehan suara 73.205 suara melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP-BUP-XV/2017 tertanggal 31 Juli 2017, hakim yang menyidangkan hasil PSU di Kabupaten Tolikara menguatkan SK KPU Nomor : 34/kpts/KPU-Kab.TLK/Tahun 2017 yang telah menetapkan pasangan calon Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo sebagai pemenang Pilkada Tolikara periode 2017-2022.

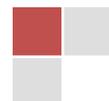
Munculnya konflik politik, bahkan kekerasan politik di Kabupaten Tolikara membawa dampak bukan saja polarisasi jabatan, ini orangnya bupati dan yang itu orang lawan bupati, tetapi menyebabkan situasi konfliktual dalam tubuh birokrasi. Situasi demikian dapat membawa dampak tersingkirnya orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan, tetapi karena dianggap lawan politik yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai dengan kemampuannya. Selain adanya gejala *idle capacity* orang yang memiliki kapasitas, tetapi nganggur karena tidak diberi jabatan dan tugas yang jelas, juga karena dasar penempatan lebih atas pertimbangan orang bupati yang terpilih.

## METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan desain penelitian ini dimaksudkan untuk memahami efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017 secara mendalam (tidak meluas). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Whitney (1960:160) metode deskriptif adalah

Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya menurut Kriyantono (2006) bisa dibagi menjadi empat tipe yaitu penelitian jenis eksploratif, deskriptif, eksplanatif, dan evaluatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Kriyantono (2006) menjelaskan, jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, dan akurat tentang fakta-fakta objek tertentu. Tipe penelitian



kualitatif digunakan karena pada penelitian ini ingin mencari dan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai strategi permasalahan yang diteliti.

## TEORI

Dalam konteks penelitian ini konsep yang digunakan untuk mengefektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017 dan berdasarkan data empiris di lapangan, Peneliti menggunakan teori efektivitas Menurut Steers sebagaimana yang dikutip oleh Tangkilisan (2005:64) adalah “produktivitas, fleksibilitas, dan kepuasan masyarakat” sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan organisasi, sedangkan kemampuan berlabra dan pencarian sumber daya tidak bahas, karena merupakan bagian dari tujuan organisasi bisnis.

Fleksibilitas digunakan sebagai salah satu kriteria efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua dalam penelitian ini merupakan salah satu kriteria jangka pendek yaitu menyangkut kemampuan organisasi pemerintah untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas organisasi yang satu ke aktivitas organisasi yang yang lainnya guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda, serta menanggapi permintaan pelanggan atau tuntutan reformasi.

Demi kepentingan jangka panjang maka pengembangan organisasai dan staf merupakan ukuran efektivitas jangka menengah guna menjamin efektivitas organisai melalui investasi sumber daya (melalui pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana) guna memenuhi permintaan organisasi dan lingkungan mendatang.

Pergantian atau penempatan pegawai dan kesiapan untuk menerima perubahan organisasi sesuai ketentuan supra struktur organisasi dan kemungkinan pengembangannya di masa datang juga digunakan sebagai kriteria efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua. Untuk terlaksananya pengendalian (monitoring dan evaluasi) secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan standar kinerja, baik individu, kelompok maupun organisasi secara transparan.

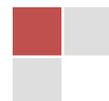
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017**

#### **a. Produktivitas**

Produktivitas pemerintah daerah Kabupaten Tolikara yang dicapai saat ini dapat dilihat pada data penelitian yang diolah berdasarkan LAKIP pemerintah daerah Kabupaten Tolikara tahun 2017. Dalam LAKIP tersebut terdapat 52 program pemerintah daerah. Program yang mampu direalisasikan hanya 35 program atau 67,3%. Sebaliknya yang tidak terealisasi berjumlah 17 program atau 32,7% dari 52 program. Program kerja yang terealisasi memiliki variasi tingkat capaian, yakni yang mencapai realisasi 100% hanya terdapat 15 program atau 28,8% dan yang tidak mencapai tingkat realisasi 100% yakni 20 program atau 71,2% dari total program kerja. Sementara jika realisasi program dilihat pada sisi kegiatannya dari 430 jenis kegiatan, tampaknya kegiatan yang terealisasi hanya 348 atau 80,9% dan kegiatan yang tidak terealisasi berjumlah 82 kegiatan atau 19,1% dari keseluruhan kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Tolikara sampai dengan tahun 2017.

Informasi realisasi program kerja pemerintah daerah yang diungkap dalam LAKIP Kabupaten Tolikara tahun 2017, merupakan program kerja yang masih menggunakan metode



penggolongan program menurut bidang pemerintahan. Belum mengacu pada PP No. 38 tahun 2007 di mana saat ini menjadi pedoman dasar dalam menentukan urusan pemerintahan apa saja yang menjadi urusan pemerintahan daerah, termasuk cakupan program apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini tampak dari masih dicantumkannya urusan agama beserta programnya dalam LAKIP Kabupaten Tolikara tersebut. Padahal saat ini, urusan agama merupakan salah satu di antara enam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Penjelasan realisasi program tersebut, secara umum memberi gambaran bahwa pencapaian nilai produktivitas pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara, tampaknya belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari tingkat realisasi program yang hanya mencapai 67,3% (35 program) dari 52 program. Demikian pula tingkat realisasi kegiatan, ternyata hanya 80,9% (348 program) dari 430 kegiatan. Kenyataan ini tentu menjadi sesuatu yang ironi bagi Kabupaten Tolikara sebagai salah satu daerah otonom di masa desentralisasi pemerintahan daerah sekarang.

#### **b. Fleksibilitas**

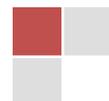
Nilai fleksibilitas organisasi tidak hanya bisa dinilai dari kebijakan pembentukan dan format struktur organisasi perangkat daerah, tetapi juga fleksibilitas khususnya nilai inovasi dapat dilacak pada jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, tampaknya cenderung hanya bersifat pengulangan dari program dan kegiatan sebelumnya, meskipun pelaksana dan lokasi kegiatan berubah. Akibatnya program dan kegiatan pemerintah daerah hanya bersifat rutinitas tahunan. Selain itu, jenis program dan kegiatan sebagian besar adalah kelanjutan dari tahun sebelumnya. Program lanjutan terjadi terutama pada kegiatan yang bersifat fisik seperti fasilitas publik (bangunan, jalan dan jembatan).

Nilai fleksibilitas organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara tercermin hanya terbatas pada aspek penyusunan struktur dan format organisasi perangkat daerahnya. Tetapi jika dilihat dari segi program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara, tampaknya nilai inovasi masih kurang karena kebanyakan program dan kegiatan pemerintah hanya bersifat rutinitas dan kelanjutan dari tahun sebelumnya.

#### **c. Kepuasan Masyarakat**

Aspek kepuasan masyarakat ini lebih fokus pada eksternal organisasi. Organisasi yang memiliki nilai efektivitas yang tinggi erat kaitannya dengan karakter asli yang dimiliki oleh organisasi publik (birokrasi) di mana aparat pemerintah (birokrat) bekerja atas wewenang yang sudah ditentukan. Nilai-nilai efektivitas organisasi yang dipengaruhi oleh kontrol yang tinggi dalam organisasi dan mencerminkan ciri-ciri utama organisasi publik seperti yang diterangkan di atas, pada kenyataannya masih sangat menonjol di dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tolikara saat ini. Hal ini tampak dari hasil pengamatan penulis, di mana semua aktivitas aparat perangkat daerah, baik aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan program-program pembangunan maupun tugas-tugas pelayanan dasar kepada warga, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kependudukan (KTP, akta kelahiran, akta nikah) dan sebagainya.

Semua jenis aktivitas tersebut selalu didasari oleh standar operasional dan prosedur (SOP) resmi yang ditetapkan oleh Bupati Tolikara. Sebagai contoh nyata adalah apa yang



dialami oleh penulis ketika melakukan penelitian ini. Semua tahap dalam proses penelitian ini harus melewati prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya saja, penelitian ini harus memiliki surat rekomendasi penelitian tentang izin pengumpulan data dan izin melakukan wawancara dengan para informan yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tolikara.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017**

#### **a) Faktor Pendukung Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2017 di Kabupaten Tolikara**

##### **a) Komitmen peminan (bupati terpilih)**

Efisiensi dan profesionalitas birokrasi menjadi salah satu masalah yang akan dihadapi oleh kepemimpinan baru yang dipilih melalui proses yang demokratis. Disamping itu dukungan dari seluruh aparatur pemerintahan terhadap bupati terpilih akan memberikan dampak yang positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

##### **b) Kemampuan organisasi (aparatur pemerintahan)**

Selama proses pilkada telah terjadi perpecahan di birokrasi pemerintahan sehingga diperlukan komitmen pimpinan dan juga dukungan dari masyarakat serta aparat pemerintahan yang menjadi pelaksana dari program-program bupati terpilih.

##### **c) Dukungan masyarakat.**

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepala daerah terpilih perlu melakukan rekonsiliasi di dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat, sehingga aparatur pemerintahan dapat melaksanakan program-program yang dijanjikan

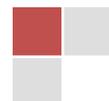
### **Strategi Mengefektifkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017**

Berpedoman pada hasil analisis SOAR dan uji Litmus Test yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan empat isu strategis yang selanjutnya dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara sebagai upaya untuk Mengefektifkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017. Dari hasil yang diperoleh, strategi yang disarankan sebagai berikut:

1. Menyusun program-program yang dapat mengembangkan potensi sumber daya aparatur dalam meningkatkan kinerja.
2. Pemberian kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan kuantitas pembinaan dan pengawasan terhadap para bawahan.
4. Peningkatan kinerja aparatur melalui ketaatan terhadap aturan yang berlaku, dan penerapan uraian tugas yang jelas.

### **PENUTUP**

Pencapaian nilai produktivitas pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara, tampaknya belum optimal. Nilai fleksibilitas organisasi perangkat



daerah Kabupaten Tolikara tercermin hanya terbatas pada aspek penyusunan struktur dan format organisasi perangkat daerahnya. Masyarakat belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung tahun 2017 di Kabupaten Tolikara belum efektif. Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung tahun 2017 di Kabupaten Tolikara :

- a. Faktor mendukung, yaitu :
  - 1) Komitmen peminan (bupati terpilih).
  - 2) Kemampuan organisasi (aparatur pemerintahan)
  - 3) Dukungan masyarakat.
- b. Faktor menghambat, yaitu :
  - 1) Loyalitas ganda dari aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tolikara.
  - 2) Jenjang pengambilan keputusan yang panjang, lama, berbelit.

Strategi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tolikara, yaitu :

- 1) Menyusun program-program yang dapat mengembangkan potensi sumber daya aparatur dalam meningkatkan kinerja.
- 2) Pemberian kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 3) Peningkatan kuantitas pembinaan dan pengawasan terhadap para bawahan.
- 4) Peningkatan kinerja aparatur melalui ketaatan terhadap aturan yang berlaku, dan penerapan uraian tugas yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka cipta.
- Ardana, I Komang, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. Metodologi Penelitian untuk Public Relations. Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Basrowi, Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Prenada Media Grup, Jakarta.
- Cakra, Arbas. 2012. Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada Di Provinsi Aceh, Jakarta : Sofmedia.
- Creswell, John W. 2009. Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publication Inc,
- Dwiyanto, Agus, 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gaffar, Janedri M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konpress.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 2005, Organisasi, alih bahasa Nunuk Adiami, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.



- Irving, Zeitlin M. 1995. Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta: Gadjah Mada press.
- Kirk, Jerome, dan Marck L. Miller, 1986. Reliability and Validity Qualitative Research, Qualitative Research Methods. Series 1, A Sage University Paper.
- Kenneth, NW dan Garry. A. Yulk. 1992. Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Kertapraja, E Koswara, 2012, Pemerintahan Daerah : Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi, INNER, Jakarta.
- Komaruddin. 2004. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kriyantono, Rahmat, 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group.
- Lee Myungsuk, 2003. Conceptualizing the New Governance: A New Institution of Social Coordination, Indiana University, Bloomington Indiana.
- Marijan, Kacung, 2006. Demokratisasi di Daerah, Pustaka Eureka & PusDeHAM, Surabaya.
- Marijan, Kacung, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratisasi di Daerah, Airlangga University Oress, Surabaya.
- Muluk, Khairul M.R., 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayu Publishing, Malang.
- Mayer, Robert R & Ernest Greenwood, 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Rajawali, Jakarta.
- Miles, M.B dan Huberman. 1994. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjeptjep Rohidi, UI Press : Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munandar, Soelaeman. 2008. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Refika Aditama.
- Musanef. 1984 . Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : Gunung Agung.
- Muthalib, M.A. dan Mohd. Akbar Ali Khan, 2013. Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Lokal), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta.
- Narbuko dan Achmadi. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant, Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi, Media Komputindo, Jakarta, 2000.

